



JURNAL ECONOMIC DEVELOPMENT

E-ISSN : 3031-5891

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANGKA
PARTISIPASI SEKOLAH DI INDONESIA****Mellisa Putri^{1*}, Irwan Muslim²**¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta, ²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta*Corresponding author: mellisaputri180@gmail.com, irwanmuslim64@gmail.com**Abstract**

This research aims to analyze the influence of Per Capita Income, Government Expenditures in the Education Sector, Student to Teacher Ratio and Number of Poor Population on School Enrollment Rates in Indonesia. The data used is secondary data, namely data on Indonesia's Gross Regional Domestic Product (GRDP), Student to Teacher Ratio, Government Expenditures in the Education Sector, Number of Poor Indonesian Population, and School Enrollment Rates aged 16-18 in 2017-2022. The data analysis method used is Panel Data Regression Analysis. The research results show that Per Capita Income and the Student to Teacher Ratio have a positive and significant effect on School Enrollment Rates in Indonesia. The number of poor people has a negative and significant effect on school participation rates in Indonesia, while government spending in the education sector does not have a significant effect on school enrollment rates in Indonesia.

Keywords : *School Enrollment Rate, Per Capita Income, Government Expenditures in the Education Sector, Student to Teacher Ratio, Number of Poor Population*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Perkapita, Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Rasio Murid Terhadap Guru dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data Produk Domestik Bruto Regional Bruto (PDRB) Indonesia, Rasio Murid Terhadap Guru, Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia, dan Angka Partisipasi Sekolah umur 16-18 tahun 2017-2022. Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Data Panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Perkapita dan Rasio Murid Terhadap Guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia. Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia, sedangkan Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia.

Kata Kunci : **Angka Partisipasi Sekolah, Pendapatan Perkapita, Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan, Rasio Murid Terhadap Guru, Jumlah Penduduk Miskin**

Informasi Artikel

Diterima : 22/04/2024

Review Akhir : /05/2024

Diterbitkan online : 06/2024

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk dengan jumlah yang padat. Menurut World Bank (2022) Indonesia menduduki peringkat empat dunia dengan jumlah penduduk sebanyak 275,501,339 jiwa. Negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar tentu memiliki banyak keuntungan, salah satunya adalah melimpahnya sumber daya manusia. Namun permasalahan timbul ketika sumber daya manusia yang dimiliki tidak memiliki kualitas yang baik. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah investasi bagi suatu negara. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dilaksanakan melalui berbagai sektor pembangunan, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan, tenaga kerja, dan sektor-sektor pembangunan lainnya (Mulyadi, 2003). Sektor pendidikan adalah bagian yang krusial dalam tujuan pembangunan suatu negara. Tidak dapat dipungkiri melalui sektor pendidikan sebagai penyumbang besar kemajuan suatu negara (Zahra, 2019).

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting yang terus diupayakan oleh pemerintah demi memperbaiki mutu masyarakat Indonesia. Setiap masyarakat Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional yang menetapkan bahwa pemerintah berkewajiban memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (Elfarabi, 2018).

Untuk melihat seberapa besar kemajuan sektor pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah jumlah penduduk melek aksara yang terlibat dalam kegiatan memperoleh pendidikan usia 16—18 tahun atau setara dengan pendidikan sekolah menengah atas (SMA/SMK). Peningkatan angka partisipasi sekolah (APS) juga merupakan tolak ukur keberhasilan pendidikan suatu daerah yang ada di Indonesia.

Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh, semakin kecil angka partisipasi sekolah yang disumbangkan. Tidak meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti pendidikan seluruh daerah merata. Dengan demikian pendidikan perlu diperhatikan jika masih banyak daerah yang kecil presentase partisipasi sekolahnya. Artinya program pemerintah dalam sektor pendidikan belum berhasil. Hal ini disebabkan rendahnya mutu pendidikan yang dapat dilihat dari pemerataan pendidikan untuk anak Indonesia.

LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Angka Partisipasi Sekolah

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka partisipasi sekolah merupakan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan menjadi indikator untuk mengetahui kemajuan pendidikan di suatu daerah. Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikannya melalui seberapa besar angkapartisipasi sekolah (Dewi, 2015).

Angka partisipasi sekolah menunjukkan kondisi pendidikan suatu daerah. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting bagi kemajuan suatu daerah. Pendidikan menjadi salah satu sarana bagi pemerintah suatu daerah untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga bersaing dalam persaingan global. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah menjadi tanda upaya pemerintah untuk meningkatkan pendidikan diberbagai daerah telah berhasil. Sebaliknya apabila

angka partisipasi sekolah rendah maka pemerintah belum maksimal dalam upaya peningkatan pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah merupakan keterlibatan aktif warga sekolah dan masyarakat dalam kegiatan sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat dihitung dengan mencari presentase jumlah penduduk usia 16-18 tahun dibagi dengan jumlah seluruh penduduk usia 16-18 tahun di kali seratus (BPS, 2023).

Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita adalah suatu ukuran yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk yang bersangkutan. Pendapatan disini dapat diartikan nilai balas jasa yang diterima atas penggunaan faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi tersebut di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata masyarakat atau penduduk. Dengan demikian pendapatan perkapita pada satu tahun didapat dengan jalan membagi pendapatan pada tahun yang bersangkutan dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama (Koto,2015). Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit usaha di suatu wilayah, atau total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi di suatu wilayah. Jika PDRB ini dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama maka disebut PDRB per kapita.

Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan

Program pendidikan yang berkualitas dapat terwujud apabila pemerintah dapat memberikan sarana dan prasarana yang baik tanpa adanya beban yang membebani masyarakat, terutama dalam pembiayaan pendidikan (Zahra, 2019). Pengeluaran pemerintah terhadap sektor pendidikan merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang mamacu kesejahteraan masyarakat dan akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah ini berupa pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan tenaga pendidik, akses ke sarana pendidikan dan sebagainya (Hartoyo & Anggraeni, 2014).

Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat (Pake, dkk, 2018). Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang pengalokasian dana pendidikan disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rasio Murid Terhadap Guru

Rasio Murid Guru (RMG) digunakan untuk mengukur kecukupan jumlah guru untuk mendidik muridnya. Semakin tinggi rasio murid per guru akan mengakibatkan pembelajaran yang dilakukan semakin tidak efektif karena jangkauan seorang guru dalam melakukan pengawasan terhadap murid ada batasnya. Namun jika terlalu sedikit rasio murid per guru, maka akan menimbulkan masalah besarnya biaya pendidikan yang akan dikeluarkan.

Rasio murid terhadap guru merupakan bagian terpenting dalam faktor input pendidikan karena guru disini berperan selain sebagai faktor input pendidikan dan bagian dari sarana

pendidikan yang disediakan pemerintah namun guru juga berperan sebagai pendidik yang menentukan bagaimana kualitas murid dan output pendidikan lain baik dari segi akademis dan non akademis (Huda & Sasana, 2013). Rasio murid terhadap guru dapat digunakan untuk mengukur kecukupan jumlah guru untuk mendidik muridnya.

Jumlah Penduduk Miskin

Menurut BPS, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lainnya yang tak kalah pentingnya seperti kesehatan, pendidikan, dan lainnya (Zahra, 2019). Kemiskinan merupakan dampak dari kurangnya kesejahteraan yang dialami masyarakat. Kemiskinan dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti, adanya ketimpangan pendapatan di masyarakat, masalah pendidikan, pengangguran, upah minimum provinsi pun ikut menentukan karena apabila kebutuhan dasar dapat tercapai maka pekerja mampu terlepas dari masalah kemiskinan karena mendapat kesejahteraan upah, selain itu adanya inflasi juga mampu mempengaruhi jumlah penduduk miskin dimana inflasi yang terjadi bagi kelompok dengan tingkat pendapatan rendah akan mengalami penurunan daya beli uang untuk membelanjakan kebutuhan dasar harian (Miftakhul Jannah, 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode data panel. Dalam penelitian ini meliputi 34 provinsi Indonesia. Periode yang diteliti dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Perkapita, Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Rasio Murid Terhadap Guru dan Jumlah Penduduk Miskin.

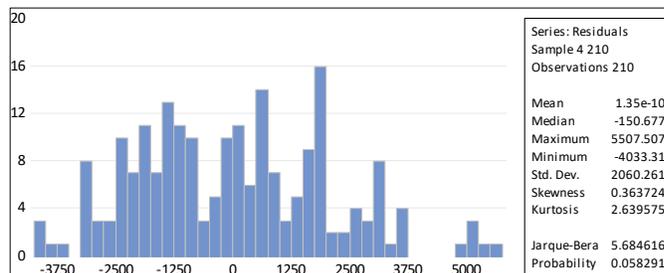
Model persamaan yang akan diestimasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \epsilon_{it} \dots \dots \dots$$

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis pengaruh antar variabel dalam penelitian ini berupa metode estimasi model regresi panel dengan lebih menekankan pada pendekatan model analisis panel data, maka pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan *Common Effect Model (CEM)* atau *Fixed Effect Model(FEM)* atau *Random Effect Model (REM)*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil terlihat pada sub bab dibawah ini: Hasil Pengujian Normalitas Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui pola sebaran data yang mendukung setiap variabel penelitian. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Jarque Bera (JB). Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil terlihat pada grafik seperti terlihat pada Gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1 Hasil Pengujian Normalitas

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan pendekatan grafik diperoleh nilai probability sebesar 0.058. Nilai probability yang diperoleh jauh diatas 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian yang digunakan telah berdistribusi normal sehingga tahapan pengolahan data lebih lanjut dapat segera dilakukan.

Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil pengujian masing-masing effect regresi panel terlihat pada sub bab dibawah ini:

Uji Persyaratan Pemilihan Efek Regresi Panel

Pada penelitian ini pengujian persyaratan yang digunakan terdiri dari tahapan pengujian yaitu sebagai berikut:

Pengujian Chow

Menurut Winarno, (2014) pengujian Chow dilakukan untuk menentukan antara common effect atau fixed effect yang paling tepat untuk dijadikan alat analisis dalam estimasi data panel. Dalam melakukan pengujian Chow, masing-masing variabel diregresikan terlebih dahulu dengan model common effect atau pun fixed effect. Ketika hasil pengujian menunjukkan nilai probability F-stat dibawah 0.05 maka lulus pengujian Chow sehingga model regresi panel menggunakan fixed effect model. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh ringkasan terlihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1 Hasil Pengujian Chow-Test

Model	Statistic	Prob
Cross-section F	609.944435	0.0000
Cross-section Chi-square	1009.318109	0.0000

Berdasarkan hasil pengujian Chow diperoleh nilai probability sebesar 0.000. Nilai probability yang dihasilkan berada dibawah 0.05 dengan demikian penggunaan fixed effect model merupakan model analisis yang tepat.

Pengujian Hausman

Menurut Winarno, (2014) mengungkapkan uji Hausman yaitu untuk menentukan uji mana diantara kedua metode efek acak (*random effect*) dan metode(*fixed effect*) yang sebaiknya dilakukan dalam pemodelan data panel. Jika nilai probability period random diatas 0.05, maka persyaratan pengujian Hausman test terpenuhi dan sebaliknya. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3 Hasil Pnegujian Hausman

Test Summary	Statistic	Prob
Cross-section Random	6.997805	0.0000

Diperoleh nilai Prob.Cross Section Random sebesar 0.0000 sehingga jika dibandingkan hasilnya adalah Prob.Cross Section Random < 0.005. Oleh karena itu, kesimpulan uji Hausman adalah *Fixed Effect* lebih baik dibandingkan *Random Effect*. Dikarenakan model analisis yang terpilih sama-sama *Fixed Effect Mode*, maka tidak perlu dilakukan pengujian Lagrange Multiplier (LM) test.

Hasil Pengujian t-Statistik

Pengujian t-statistik bertujuan untuk membuktikan signifikan atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual.

	Persamaan Regresi					
	$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{it} + \beta_3 X_{it} + \beta_4 X_{it} + U_{it}$					
	Coefficient	t-stat	P-value	R ²	Prob. F-Stat	DW
C	13.46146	2958.344	0.0000	0.992205	0.000000	1.282483
L X1	0.002029	6.675269	0.0000			
L X2	2.452900	0.441554	0.6594			
L X3	6.230090	1.824683	0.0069			
L X4	-0.000995	-2.508946	0.0130			

Tabel 4 Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Berdasarkan hasil estimasi, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (R-Squared) yang diperoleh sebesar 0,99, hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pendapatan perkapita, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, rasio murid terhadap guru, dan jumlah penduduk miskin mampu memberikan kontribusi naik turunnya variabel angka partisipasi sekolah di Indonesia sebesar 99 persen . Sedangkan sisanya 1 persen dipengaruhi oleh variabel diluar model penelitian ini. Berdasarkan hasil pengujian, p-value dari pendapatan perkapita (X1) sebesar 0,0000 < alpha (0,05) , maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan pendapatan perkapita terhadap angka partisipasi sekolah. Berdasarkan hasil pengujian p-value dari pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan (X2) sebesar 0,6594 > alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi sekolah. Berdasarkan hasil pengujian p-value dari rasio murid terhadap guru (X3) 0.0069 < alpha 0,05 , maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang positif dan pengaruh signifikan rasio murid dengan guru terhadap angka partisipasi sekolah. Pada tahapan pengujian hipotesis terakhir dari jumlah penduduk miskin (X4) diperoleh nilai p-value 0,0130 < alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan penduduk miskin terhadap angka partisipasi sekolah.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Angka Partisipasi Sekolah

Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel Pendapatan Perkapita sebesar 0,002029 memiliki arah hubungan yang positif terhadap angka partisipasi sekolah

yang artinya apabila terjadi kenaikan sebesar 1 persen pada pendapatan perkapita maka angka partisipasi sekolah naik sebesar 0,002029 persen dengan asumsi variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, rasio guru terhadap murid, jumlah penduduk miskin dianggap tetap. Variabel pendapatan perkapita ini berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis awal yang menunjukkan bahwa pendapatan perkapita memiliki pengaruh terhadap angka partisipasi sekolah yang ada di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Huda dan Sasana (2014), Hartoyo & Anggraeni (2014), Koto (2015), Elfarabi (2018), Devliana & Sentosa (2023), Virdam & Nani Ariani (2023).

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah

Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan sebesar 2,452900 memiliki arah hubungan yang positif terhadap angka partisipasi sekolah yang artinya apabila terjadi kenaikan sebesar 1 persen pada pengeluaran pemerintah sektor pendidikan maka angka partisipasi sekolah naik sebesar 2,452900 persen dengan asumsi variabel pendapatan perkapita, rasio guru terhadap murid dan jumlah penduduk miskin di anggap tetap. Nilai probabilitasnya adalah sebesar $0,6594 > 0,05$, maka dapat diartikan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian Yanti (2023) yang menyatakan bahwa belanja pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi sekolah. Disebabkan karena setiap peningkatan belanja fungsi pendidikan tidak diikuti dengan peningkatan angka partisipasi sekolah karena tidak semua Pemerintah Daerah (Pemda) memprioritaskan belanja fungsi pendidikan karena masing-masing Pemda memiliki prioritas kebutuhan bidang yang berbeda-beda dalam mengalokasikan dana yang ada, sehingga tidak mempengaruhi angka partisipasi sekolah. Peningkatan belanja fungsi pendidikan tidak sesuai dengan peningkatan anggaran angka pendaftaran sekolah. Karena sebaran yang guru tidak merata, hal ini tercermin pada daerah yang jumlah gurunya tinggi tetapi angka partisipasi cenderung kecil dan daerah yang jumlah gurunya sedikit.

Pengaruh Rasio Murid Guru Terhadap Angka Partisipasi Sekolah

Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel Rasio Murid Terhadap Guru sebesar 6,230090 memiliki arah hubungan yang positif terhadap angka partisipasi sekolah yang artinya apabila terjadi naik sebesar 1 persen pada rasio murid guru maka angka partisipasi sekolah naik sebesar 6,230090 persen dengan asumsi variabel pendapatan perkapita, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan jumlah penduduk miskin dianggap tetap. Hal ini menunjukkan bahwa variabel rasio murid terhadap guru berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis awal yang menunjukkan bahwa rasio murid terhadap guru memiliki pengaruh terhadap angka partisipasi sekolah yang ada di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Huda & Sasana (2014), Rahmadina et.al (2021).

Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Angka Partisipasi Sekolah

Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel Jumlah Penduduk Miskin sebesar (-0,000995) memiliki arah hubungan yang negatif terhadap angka

partisipasi sekolah yang artinya apabila terjadi naik sebesar 1 persen pada jumlah penduduk miskin maka angka partisipasi sekolah turun sebesar 0,000995 persen dengan asumsi variabel pendapatan perkapita, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan rasio murid terhadap guru dianggap tetap. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk miskin berhubungan negatif dan signifikan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmatin & Soejoto (2017), Elfarabi (2018), Zahra (2019), Nau Dewa & Prasetyo (2022), Yanti et.al (2023), Delviana & Sentosa (2023), Virdam & Nani Ariani (2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan kepada analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis maka diajukan beberapa kesimpulan penting yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu : Pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia. Rasio murid terhadap guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia, dan jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia.

KETERBATASAN DAN SARAN

Pemerintah harus mengalokasikan dan memberikan anggaran lebih besar dalam sektor Pendidikan. Mendanai penyelenggaraan pendidikan, yang merupakan kewajiban pemerintah. Pendidikan mendapat anggaran minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah. Pasal 49 Sistem Pendidikan Nasional tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Menurut undang-undang, dana pendidikan selain gaji pendidik dan belanja dinas pendidikan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk sektor pendidikan, serta 20% dari APBN dan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pendidikan (APBD). Dengan begitu, pemerataan distribusi fasilitas belajar mengajar dapat secara merata ke seluruh daerah, khususnya ke daerah yang belum memadai secara infrastruktur pendidikan. Pada akhirnya, semua siswa memiliki hak pendidikan dengan kualitas yang sama.

Pemerintah tidak hanya memberi anggaran untuk memperbaiki masalah, tetapi juga harus memperhatikan bahwa anggaran tersebut sudah tersebar dengan merata sampai ke pelosok daerah serta harus dilakukan pemantauan penggunaan dana tersebut agar semua sekolah yang ada di Indonesia memiliki fasilitas yang cukup untuk menaikkan mutu Pendidikan Indonesia serta mendorong perekonomian sehingga masyarakat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi agar pendidikan dapat di peroleh lebih mudah. Pemerintah sebaiknya membuka lapangan kerja bagi masyarakat miskin untuk bisa mengurangi persentase kemiskinan serta meningkatkan perekonomian. Dengan demikian diharapkan masyarakat mampu meningkatkan produktivitas atau memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan lebih baik serta tidak terjerat dalam kemiskinan.

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel penelitian lain yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih kompleks sesuai dengan teori yang mendukungnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aurellin, D., & Sentosa, S. U. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap APM (Angka Partisipasi Murni) di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 89.
- Badan Pusat Statistik, (2023). *Statistik Indonesia Tahun 2023*. Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistik.
- Elfarabi, (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia*. Depok : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hartoyo, S., & Anggraeni, L. (2014). Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP di Jawa Barat Determinant of Junior Secondary School Enrollment Rate in West Java. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 15(1), 91–112.
- Huda, N. A., & Sasana, H. (2013). Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang Pendidikan (Studi Kasus: Provinsi DKI Jakarta). *Diponegoro Journal of Economics*, 2, 1–13.
- Koto, Jolianis. (2015). Pengaruh Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Pendidikan Kepala Rumah Tangga Terhadap Angka Partisipasi Sekolah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Economica*, 3(2), 169–184.
- Manurung, F. A., & Santoso, D. B. (2015). Pemetaan Kemiskinan Kabupaten/Kotadi Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 4(1), 1–10.
- Miftakhul Jannah. (2022). *Analisis Pengaruh Angka Partisipasi Sekolah, Sektor Informal, Jumlah Penduduk Miskin Dan Pendapatan Pekerja Anak Terhadap Jumlah Pekerja Anak Di Provinsi Jambi Tahun 2000 – 2019*. Universitas Jambi.
- Mulyadi. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Nau Dewa & Prasetyo, A. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun (SMASederajat) Di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2021. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2022(1), 175–184.
- Rahmatin, U. Z., & Soejoto, A. (2017). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Sekolah terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 01(2), 127–140.
- Supriadi, Dedi (2010). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Virdam, F., & Nani Ariani, M. B. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah Pada Provinsi Di Pulau Sulawesi. *Jurnal of Development Economic and Digitalization*, 2(1), 20–35.

- Winarti, A. (2014). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan PDB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 1992-2012. *Universitas Diponegoro*, 1–72.
- Winarno, W. W. (2014). Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Menggunakan Eviews(Cetakan 5). UPP STIM YKPN
- World Bank. (2022). Retrieved from: <https://www.worldbank.org/in/country/Indonesia/overview>
- Yanti, A. T., Imtikhanah, S., & Fatah, K. (2023). Pengaruh Belanja Pendidikan , Jumlah Guru Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah. *Universitas Muhammdiyah Pekajangan Pekalongan*.
- Zahra, N. (2019). *Pengaruh Kemiskinan Dan Anggaran Pendidikan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah Di Indonesia*. Universitas Negeri Jakarta.